

**JOE BIDEN RESMI DILANTIK, APA DAMPAK BAGI INDONESIA?**

Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/01/2021) waktu setempat. Ada dampak positif yang akan diterima Indonesia namun tidak dalam waktu dekat. Program stimulus berkelanjutan Joe Biden akan berimbas pada perbaikan kondisi ekonomi dunia, stimulus tersebut akan membantu penguatan di sektor industri keuangan dan sektor riil. Menguatnya sektor riil AS akan meningkatkan aktivitas negara-negara pengekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Melihat harga pasar saham AS Dow Jones yang menyentuh angka tertinggi 31.188, menandakan ada sentimen positif dari investor khususnya dalam komponen Industri. Tidak hanya bagi pasar saham AS, kebijakan AS diyakini akan berdampak baik bagi pasar saham global, termasuk di Indonesia. Pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden akan difokuskan pada perbaikan ekonomi yang lebih baik dengan mitra dagang AS. Hal tersebut akan berdampak positif bagi negara berkembang, seperti Indonesia, dengan meratanya pemulihan ekonomi AS maka berpotensi mendatangkan modal asing yang lebih banyak ke Indonesia.

**PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2021 DIPROYEKSIKAN TUMBUH POSITIF**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2021. Setelah mengalami kontraksi ditahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh positif berkisar 4,50% hingga 5,00% pada periode semester I 2021. Sementara itu pada akhir semester II pertumbuhan ekonomi akan berada di level 5,00%. Beberapa lembaga dunia seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh positif. IMF menilai kebijakan suku bunga dan pembelian obligasi yang dilakukan Bank Indonesia merupakan langkah yang tepat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih sangat bergantung dengan perkembangan Covid-19 dan proses vaksinasi serta upaya akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021 ini pemerintah juga telah merencanakan anggaran sebesar Rp 403,90 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebagian total dana ini, sebesar Rp 25,40 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Bahkan anggaran kesehatan masih akan ditambah dengan belanja yang tidak terserap di tahun 2020. Anggaran kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah dalam memperluas program vaksinasi keseluruh daerah di Indonesia. Program vaksinasi itu tentunya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata.

**REALISASI SEMENTARA PELAKSANAAN APBN**

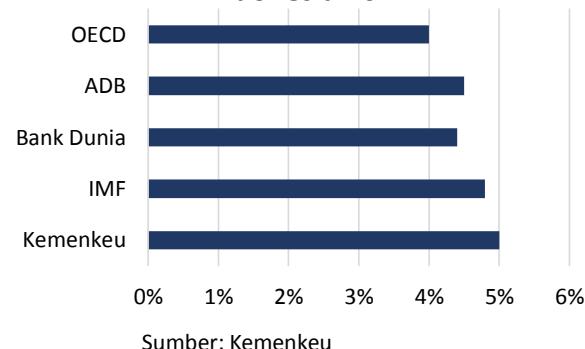
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 956,30 triliun atau setara dengan 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih baik dari prediksi sebelumnya diangka 6,30%, secara umum APBN masih relatif baik dan terjaga. Defisit anggaran dikarenakan penerimaan negara jauh lebih rendah dibandingkan belanja negara, pada 2020 negara menerima pemasukan sebesar Rp 1.633 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.589 triliun. Sedikitnya penerimaan negara disebabkan lemahnya perekonomian negara sehingga pemerintah memberikan insentif pajak dengan jumlah yang besar. Sementara untuk belanja negara, tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 12,20% dibandingkan periode tahun sebelumnya, belanja pemerintah pusat tumbuh 22,10% inilah yang mendukung pemulihan ekonomi kuartal-III dan kuartal-IV 2020. Realisasi belanja negara mencapai 94,60% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.739,2 triliun. Nilai defisit jauh lebih besar bila dibandingkan dengan undang-undang APBN 2020 awal di mana desain defisit APBN hanya sebesar 1,76% dari PDB atau mencapai Rp 307,2 triliun. Penerimaan pajak 2020 adalah yang paling terpukul oleh dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan ekonomi. APBN 2021 difokuskan pada empat hal, keempatnya yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

**PROYEKSI ANGGARAN PEN 2021**

Proyeksi alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp 403,90 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp 372,30 triliun. Total anggaran program PEN Rp 403,90 triliun tersebut akan difokuskan untuk alokasi terhadap 5 bidang yaitu kesehatan, sektoral kementerian/lembaga pemerintah daerah, perlindungan sosial, UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Sementara itu, realisasi anggaran PEN untuk tahun lalu hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 579,78 triliun atau 83,40% dari pagu Rp 695,2 triliun dan anggaran yang belum digunakan akan dialihkan untuk program PEN 2021. Bidang Sektoral kementerian/lembaga tercatat memiliki alokasi terbesar, bidang ini memberikan stimulus kepada sektor pariwisata, ketahanan pangan, program padat karya, kawasan industri, dan pinjaman daerah.

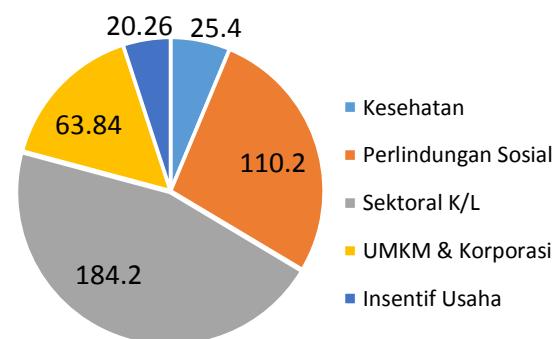
Program Stimulus	Anggaran (US\$)
Bantuan Pemerintah Negara Bagian dan Lokal	350 Miliar
Sekolah K-12 dan Institusi Pendidikan	170 Miliar
Pengujian Covid-19	50 Miliar
Program Vaksinasi	20 Miliar

**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021**



Sektor	Realisasi Sementara (triliun)	APBN 2020 (triliun)	APBN 2021 (triliun)
Pendapatan Negara	1.633,60	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Pajak	1.070	1404,5	1.445,2
Penerimaan Bukan Pajak	212,8	294,1	298,2
PNBP	338,5	294,1	298,2
Hibah	12,3	1,3	0,9
Belanja Negara	2.589,90	2.739,2	2,75
Belanja Pemerintah Pusat	1.827,40	1.975,2	1.954,5
Belanja K/L	1.055	836,4	1,032
Belanja Non K/L	772,3	1.138,9	922,6
TKDD	762,5	763,9	765,5
Transfer ke Daerah	691,4	692,7	723,5
Dana Desa	71,1	71,2	72

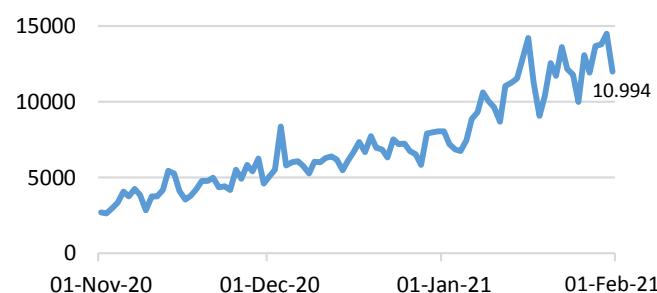
Sumber: Kemenkeu



**SEKTOR USAHA TERDAMPAK PPKM DAN RENCANA PEMBERLAKUAN LOCKDOWN**

Semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sama seperti PSBB, PPKM akan berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor dunia usaha, khususnya untuk transportasi, perdagangan, serta akomodasi dan makan/minum. Berdasarkan data BPS pada kuartal-III 2020, ketiga sektor ini mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sektor transportasi turun sebesar 16,70%, sektor perdagangan berkontraksi 5,03% dan sektor akomodasi dan makan/minum berkontraksi sekitar 11,86%. Kuartal-III 2020 merupakan cerminan dari dampak penerapan PSBB yang gencar pada saat itu diterapkan oleh pemerintah. Jika penerapan PPKM tidak maksimal, Pemerintah DKI Jakarta menyediakan opsi untuk menerapkan *lockdown* pada akhir pekan. Rencana tersebut dilandasi daya tampung Rumah Sakit di DKI Jakarta yang tidak dapat menampung lagi lebih banyak pasien Covid-19 serta untuk menekan penyebaran virus corona.

**Jumlah Kasus Positif Covid-19 Indonesia**



Sumber: Covid19.go.id; BPS

**KEBIJAKAN BANK INDONESIA MEMPERTAHANKAN SUKU BUNGA ACUAN**

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk tetap mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,00% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,50%. Keputusan ini melihat tingkat inflasi yang masih terjaga, pada Desember 2020 tercatat inflasi sebesar 1,68% kemudian turun di Januari 2021 menjadi 1,55%. Berdasarkan data BPS inflasi yang terjadi pada Januari 2021 disebabkan meningkatnya beberapa harga komoditas dalam kelompok makanan, minuman dan tembakau. Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran target sebesar 3,00%. Selain mempertimbangkan tingkat inflasi, keputusan pada RDG juga melihat pergerakan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah hingga akhir Januari 2021 masih bertahan dikisaran Rp 14.000, posisi ini menandakan kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dapat bertahan ditengah kondisi saat ini. Kebijakan moneter yang diterapkan seperti kelonggaran likuiditas membantu penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

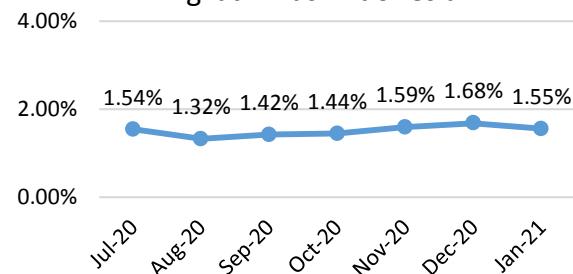
Key Rate	Des-20	Jan-21
BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)	3,75%	3,75%
Suku Bunga Deposit Facility (DF)	3,00%	3,00%
Suku Bunga Lending Facility (LF)	4,50%	4,50%

Sumber: Bank Indonesia

**Suku Bunga The FED**

0% s.d. 0,25%

**Tingkat Inflasi Indonesia**



Faktor eksternal juga mempengaruhi penetapan suku bunga acuan, dalam rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC) Bank Sentral Amerika Serikat (AS), *Federal Reserve System* (The Fed) pada 26-27 Januari 2021 memutuskan suku bunga acuan berada dikisaran 0% hingga 0,25%. Sempat menguat setelah pelantikan Joe Biden, indeks Dow Jones menurun 2,05% hal ini disebabkan Bank Sentral AS yang masih mempertahankan suku bunga. Keputusan The Fed tidak merubah suku bunganya tidak mengalami perubahan yang signifikan bagi Indonesia, karena kondisi ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2020. Bagi Indonesia, bertahannya suku bunga The Fed memberikan angin segar karena investor akan tertarik untuk mengalihkan dananya kepada negara-negara berkembang.

**KINERJA BANK SWASTA DAN KONDISI PENYALURAN KREDIT PERBANKAN**

Pertumbuhan kredit perbankan masih mengalami kesulitan akibat dampak besar pandemik Covid-19, bank swasta pada November 2020 tercatat pertumbuhan kreditnya mengalami kontraksi sebesar 5,00% sedangkan pertumbuhan simpanan naik 11,70% yang menyebabkan *Loan Deposit Ratio* (LDR) bank swasta turun ke level 83,00%. Dampak lainnya dari sisi *profitabilitas*, pertumbuhan laba bersih bank swasta menurun 16,00%. Pada Desember 2020 penyaluran kredit perbankan secara umum kembali tumbuh negatif secara *year-on-year*. Terkontraksinya pertumbuhan kredit sudah terjadi sejak September 2020. Nominal penyaluran kredit yang disalurkan perbankan pada Desember 2020 adalah Rp 5.482,50 triliun atau tumbuh 2,70% dibandingkan periode sebelumnya secara *year-on-year*. Otoritas Jasa Keuangan menilai penurunan kredit perbankan juga disebabkan oleh banyaknya debitur korporasi yang menurunkan baki debetnya hingga Rp 61,94 triliun.

**Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (triliun)**

Keterangan	2020		% (yoy)	
	Nov*	Des*	Nov-20*	Des-20*
Kredit Modal Kerja (KMK)	2.424,90	2.434	-3,8	-4,9
Kredit Investasi (KI)	1.433,90	1.446,40	0,2	-1
Kredit Konsumsi (KK)	1.595	1.602,10	-0,2	0,7

\* Data sementara  
Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan jenisnya, seluruh kredit mengalami kontraksi dan kontraksi paling dalam dialami sektor Kredit Modal Kerja (KMK). Sedangkan Kredit Investasi (KI) pada November 2020 masih tumbuh positif, sebulan kemudian menjadi minus. Sementara Kredit Konsumsi (KK) kondisinya mirip dengan KMK, kontraksinya semakin dalam. Kredit Konsumsi juga ikut berkontraksi -0,20% YoY pada November 2020 menjadi -0,70% YoY. Penurunan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna menjadi penyebab terjadinya kontraksi pada penyaluran kredit perbankan.

**BANK SYARIAH INDONESIA RESMI BEROPERASI**

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan dari anak perusahaan BUMN, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Ketiga Bank Syariah tersebut sudah menandatangani perjanjian penggabungan pada Oktober 2020 dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2021. Saat ini BSI tercatat memiliki total aset sebesar Rp 240 triliun, dana pihak ketiga (DPK) Rp 210 triliun dan modal inti sebesar Rp 22,60 triliun. Angka fantastis ini membuat kekhawatiran bagi bank syariah milik swasta karena modal yang dimiliki BSI dapat menggerus nasabah yang banyak dan mengurangi jumlah nasabah bank syariah swasta. Namun BSI sendiri menyatakan tidak akan sibuk untuk mengambil pasar bank syariah swasta, BSI justru akan memperluas pasar yang belum dimiliki oleh bank syariah sebelumnya.

TIM PENYUSUN

DIVISI MANAJEMEN RISIKO/TERINTEGRASI

Email skmr\_t@victoriabank.co.id  
Website www.victoriabank.co.id

Instagram bankvictoria  
LinkedIn PT. Bank Victoria International, Tbk

Disclaimer: Laporan ini disusun berdasarkan informasi umum dan diperoleh dari beberapa sumber yang dipercaya, namun tidak dapat dijamin keakuratan dan kelengkapannya. Setiap penggunaan atas informasi ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengguna informasi dengan melepaskan PT Bank Victoria International, Tbk dan/atau karyawan dari segala tanggung jawab atas kesalahan dan/atau kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan dan/atau penyalahgunaan informasi ini.